BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Program BOS Di Kota Bandung

Pada awalnya adanya Program Dana BOS diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2009.Salah satu indikator terselenggaranya program BOS di Kota Bandung yaitu dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun.Penuntasan program wajib belajar 9 tahun ini dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Bulan Januari 2009 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun. Oleh karena itu, mulai Tahun 2009 Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang mampu atau yang tidak mampu dan meringankan beban bagi orangtua siswa dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Bandung memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS

diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai kewenangandalam penyaluran Program Dana BOS Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan dana tersebut berasal APBD. Peran Dinas Pendidikan dalam penyaluran Dana BOS kepada SMPN 29yaitu berupa cek yang diterima kepala sekolah atas sepengetahuan komite sekolah.Penyaluran dana BOS Kota yang berwenang mengawasinya yaitu Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) serta organisasi independen yang disebut komite sekolah.

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stake-holder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Penyelenggaraan dana BOS di sekolah mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, penggunaan dana sampai kepada penyusunan laporan, tentu saja kepala sekolah tidak bekerja sendiri melainkan dengan persetujuan dari komite sekolah

sebagai perwakilan dari masyarakat. Disamping itu sekolah juga wajib memasukkan salah seorang orang tua siswa sebagaikomite sekolah yang merupakan bagian dari anggota manajemen BOS di sekolah.Adanya komite sekolah ini sebagai wujud pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program BOS di SMPN 29 Kota Bandung.

Keberadaan komite sekolah harus dijadikan semangat bagi penyelesaian masalah terhadap alokasi dana BOS. Misalnya yang terjadi di lapangan yaitu mengenai siswa miskin yang terdapat di SMPN 29, orang tua mereka masih harus mengeluarkan biaya operasional seperti biaya transportasi, biaya ekstrakulikuler renang dan konsumsi.

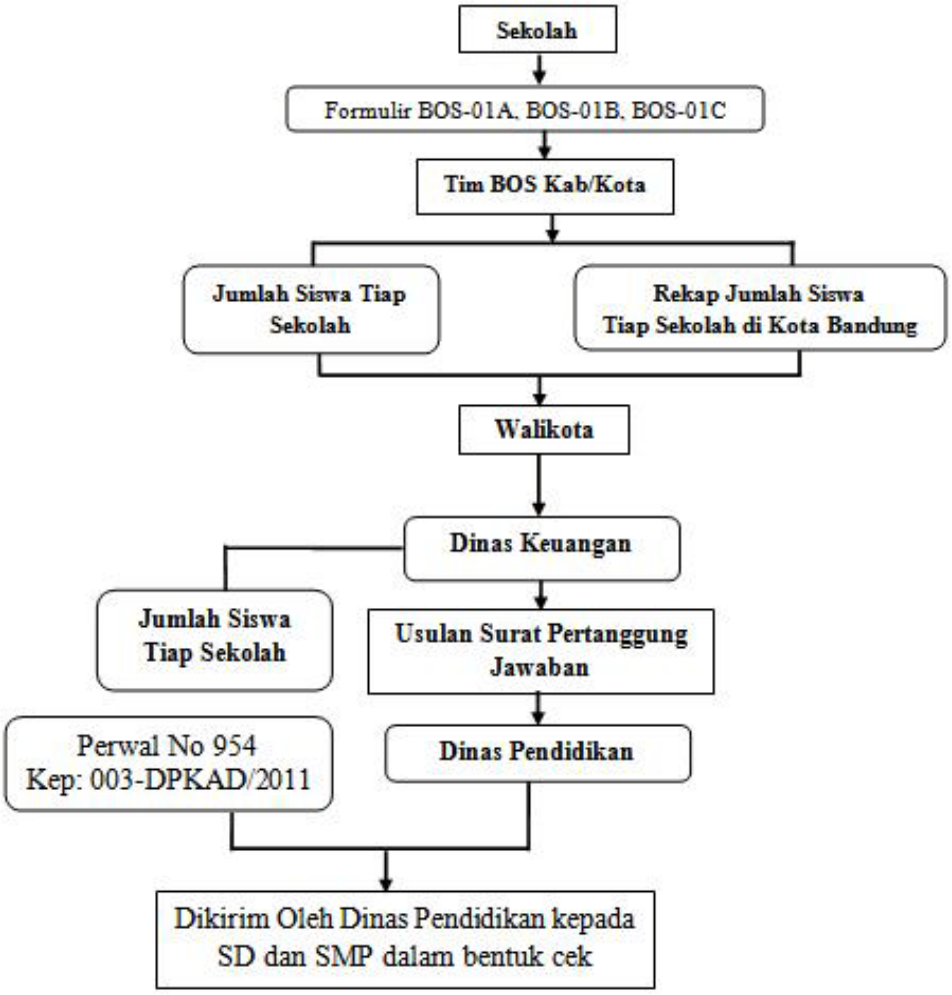
Keberadaan komite sekolah belum memberikan dampak yang maksimal seperti halnya anggaran yang terdapat dalam daftar laporan rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS APBD Tahun Anggaran 2012 dimana alokasi dana untuk biaya transportasi siswa miskin sebesar 0%. Itu artinya kepentingan siswa belum diutamakan. Seperti yang tertulis pada daftar laporan tersebut bahwa salah satu penggunaan biaya operasional sekolah tersebut terpakai untuk gaji guru honorer.

Penyelenggaraan Program BOS ini diperlukan monitoring dan pengawasan yang melekat baik secara internal maupun eksternal.Pengawasan secara internal harus dilakukan oleh Manajemen BOS di tingkat pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini tim pegawas ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS Kota Bandung. Secara eksternal dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) atau lembaga independen lainnya yang kompeten dalam mengawasinya.

3.1.2 Program Mekanisme BOS Kota Bandung

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari APBD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Pendidikan berperan dalam meyalurkan dana BOS kepada sekolah dalam bentuk cek. Pengawasan mekanisme penyaluran dana BOS harus dilakukan untuk dievaluasi mekanisme penyaluran.

Bagan 3.1
Proses Mekanisme Dana BOS Kota Bandung



Sumber: Sub Bagian Pengelola BOS Di Dinas Pendidikan Kota Bandung

3.1.3Rencana Rekapitulasi Penggunaan BOS

Berikut ini merupakan rincian penggunaan dana BOS APBD di SMPN 29 Kota Bandung yang akan diimplementasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana BOS APBD
di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung
Tahun Anggaran 2012

Penerimaan
1200 siswa x Rp 710.000

Rencana Pengeluaran

a.	Pembelian Buku Teks Pelajaran	5.00%
b.	Kegiatan PPBD	1.50%
c.	Kegiatan Pembelanjaan dan Ekstrakurikuler	15.00%
d.	Kegitan Ulangan dan Iuran	15.00%
e.	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	15.00%
f.	Langganan Daya dan Jasa	6.00%
g.	Biaya Perawatan/Pemeliharaan	15.00%
h.	Pembayaran Honor Guru dan Pegawai Hononer	20.00%
i.	Pengembangan Profesi Guru	4.00%
j.	Bantuan Transport Siswa Miskin	0.00%
k.	Pengelola BOS	1.00%
l.	Pembelian Komputer dan Printer	1.00%
m.	Lain-lain	1.50%
		100.00%

Sumber:Sub Bagian Koordinator TU SMPN 29 Kota Bandung

Seperti yang diketahui bahwa rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS di SMPN 29 dibuat bersama-sama oleh suatu komite yang dinamakan komite sekolah yang sifatnya independen bersama tim manajemen BOS SMPN 29 Kota Bandung kemudian disetujui oleh kepala sekolah.

Ada sebanyak 12 bidang yang diklasifikasikan untuk alokasi dana BOS di SMPN 29 Kota Bandung. Dua belas bidang tersebut yaitu mencakup pembelian buku teks pelajaran, kegiatan PPBD, Kegiatan pembelanjaan dan ekstrakulikuler, kegiatan ulangan dan iuran, pembelian alat dan bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, biaya perawatan/pemeliharaan, pembayaran honor guru dan pegawai honorer, pengembangan profesi guru, bantuan transport siswa miskin, pengelola BOS, Pembelian komputer dan printer serta dana lain-lain.

Ada yang menarik untuk dianalisa pada tabel rancangan rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS di SMPN 29 tersebut, yaitu pada poin ***J*** dimana membahas mengenai bantuan transport siswa miskin. Menurut peneliti hal tersebut bagus dimasukkan dalam rancangan anggaran penggunaan dana BOS tetapi belum direalisasikan karena jumlah yang dialoksasikan sejumlah 0%.

Jauh berbeda dengan kepentingan lain-lain yang dialokasikan sebanyak 1,50%. Kepentingan lain-lain dalam suatu rancangan anggaran merupakan kepentingan cadangan apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak dan bukan termasuk kebutuhan yang prioritas.

Dari kasus di lapangan yang ditemukan oleh peneliti ada orang tua siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin merasa keberatan menyekolahkan ketiga anaknya karena walaupun sudah ada bantuan BOS masih terdapat biaya-biaya operasional lainnya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa diantaranya untuk membeli buku tulis, biaya konsumsi, biaya ekstrakulikuler termasuk biaya transportasi siswa. Biaya-biaya tersebut seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh pihak sekolah dan komite sekolah yang berperan sebagai tim manajemen BOS yang bertugas untuk membuat rancangan alokasi dana BOS.

Biaya transportasi siswa miskin tersebut tidak hanya dalam bentuk nominal tunai tetapi bisa dialokasikan dalam bentuk inventaris sekolah seperti sepeda atau mobil sekolah yang bisa mengantar jemput siswa. Hal tersebut jauh lebih efektif mengingat terjadinya pemberian biaya transportasi langsung kepada siswa secara nominal lebih beresiko.

3.1.4 SMPN 29 Kota Bandung

3.1.4.1 Visi Misi SMPN 29 Kota Bandung

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut:

Visi:

“Bersahaja Berilmu Santun Handal Dijalan Allah”

Indikator : a. Unggul dalam prestasi
b. Unggul dalam bidang Ekstrakurikuler
c. Unggul dalam disiplin
d. Unggul dalam aktivitas keagamaan
e. Unggul dalam lingkungan bersih.

Misi :

a. Menyelenggarkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dengan bermuatan imtaq.
b. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya yang dijiwai semangat keunggulan, sehingga dapat berkembang secara optimal.

c. Menumbuhkan kesadaran untuk mentaati tata tertib dan budaya yang berlaku dengan dilandasi semangat keteladanan.
d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut untuk dijadikan sumber kearifan dalam bertindak.
e. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif.

3.1.4.2 Tujuan SMPN 29 Kota Bandung

a. Rata-rata nilai hasil belajar siswa meningkat sebesar 1,5.
b. Memiliki tim Olah Raga minimal 2 cabang (Sepak Bola dan Pencak Silat) yang mampu menjadi juara tingkat provinsi.
c. Memiliki kelompok kesenian yang mampu tampil pada acara resmi setingkat propinsi.
d. Minimal 98% dari seluruh jumlah siswa mentaati tata tertib dan budaya yang berlaku dengan dilandasi semangat keteladanan.
e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
f. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sebagai pusat pendidikan.

3.1.4.3 Susunan Organisasi SMPN 29 Kota Bandung

Susunan Oraganisasi Pelaksana Tim Manajemen BOS Sekolah

Mengengah Pertama Negeri 29 Kota Bandung:

1. Penanggung Jawab

   Kepala Sekolah

2. Anggota
    a. Bendahara BOS Sekolah
    b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
    a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secra lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
    b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2).
    c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota.
    d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
    e. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
    f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03)
    g. Mengumumkan penggunaan dan BOS di Papan Pengumuman (Formulir BOS-04).
    h. Bertanggung Jawab secara formal dan material atas pengunaan dana BOS yang diterimanya.

i. Membuat laporan realisasi penggunaan dan BOS triwulan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengunaan dana dan disimpan disekolah untuk keperluan monitoring dan audit.

j. Memasukan dana pengunaan dan BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id.

k. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

l. Melakukan pembukuan secra tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6)

m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05)

o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota

p. Menandatangani surat penyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7)

4. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah

a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan.

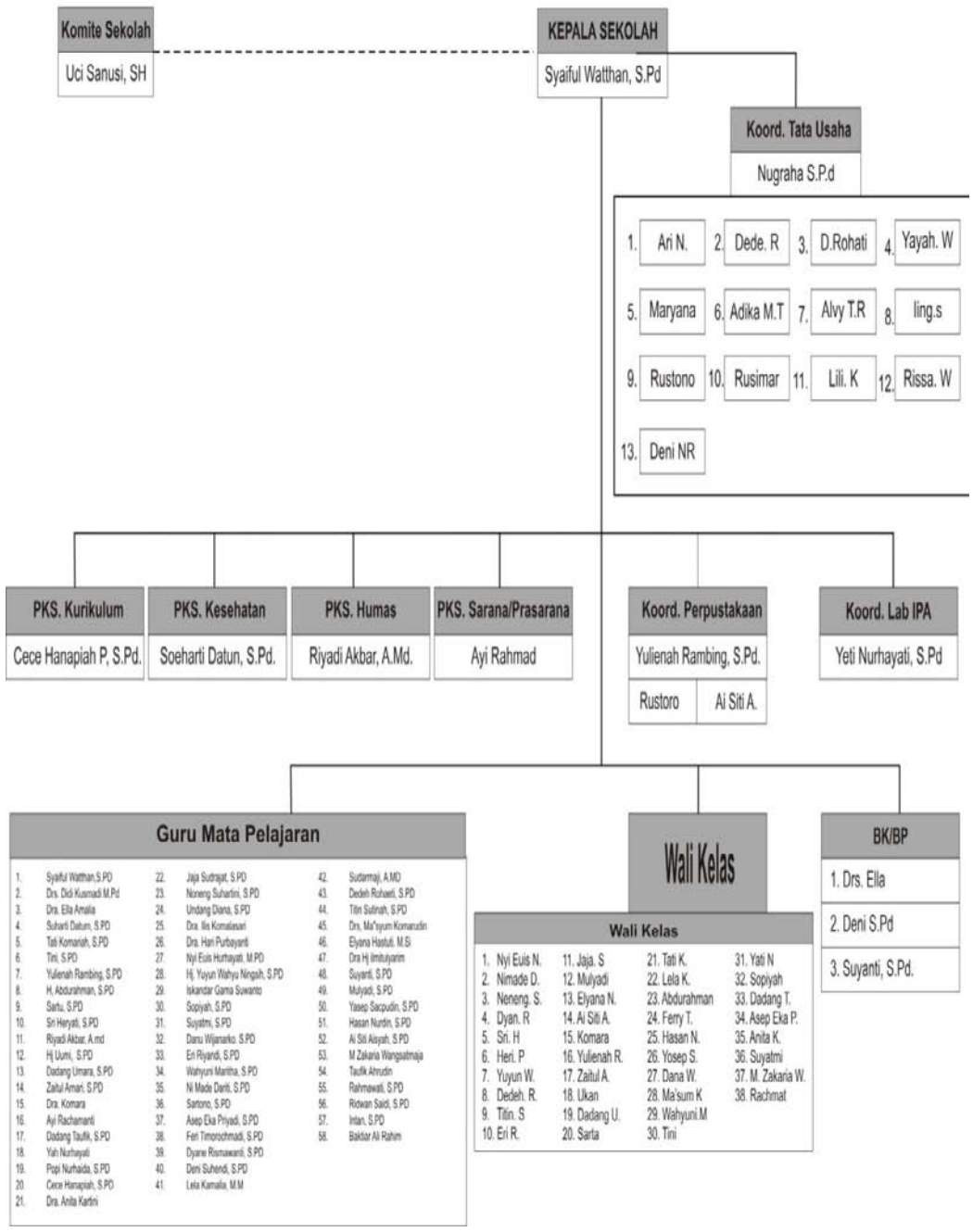
b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan pengunaan danaBOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orangtua siswa dan sekolah pada saat penerimaan rapot.

c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain.
d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa disekolah yang bersangkutan.

3.1.4.4 Struktur Organisasi SMPN 29 Kota Bandung

Di bawah ini merupakan struktur organisasi SMPN 29 Kota Bandung yang merupakan bagian dari spesialisasi tugas. Jabatan tertinggi ada pada kepala sekolah yang memiliki kedudukan setara dengan komite sekolah. Kepala sekolah membawahi bagian tata usaha sekolah, guru, wali kelas, dan BP/BK. Tata usaha sekolah membawahi bagian kurikulum, kesehatan, humas, sarana/prasarana, koordinator perpustakaan, koordinator lab IPA. Semua bagian-bagian tersebut bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Sedangkan komite sekolah dan kepala sekolah memiliki fungsi *check and balance.*

Bagan 3.1
Bagan Struktur Organisasi SMPN 29 Kota Bandung



Sumber : Sub Bagian Koordinator Tata Usaha SMPN 29 Kota Bandung

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam Skipsi ini yaitu metode deskriptif. Peneliti dalam Skipsi ini berusaha untuk mencari informasi yang faktual mengenai program BOS yang diadakan di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Informasi tersebut diolah untuk dianalisa lebih mendalam lagi berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berupaya untuk menjelaskan fakta-fakta yang faktual yang didapat dari interaksi langsung dengan para informan di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara mengamati, menganalisa serta menginterpretasikan kegiatan yang berlangsung di SMPN 29 Kota Bandung terkait dengan Penerimaan dan penyaluran dana BOS Kota Bandung. Selanjutnya fakta-fakta yang faktual tersebut diolah dalam bentuk kalimat, simbol, serta argumen-argumen yang telah dirangkai secara sistematis menurut bahasa peneliti berupa deskripsi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Skipsi. Informasi yang ada pada tulisan berkala seperti makalah, jurnal, buletin, artikel dan karangan yang tidak diterbitkan seperti paper, skripsi, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan pembahasan yang terkait dengan judul Usulan Penelitian yaitu "*Evaluasi Kebijakan Program Dana*

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Ada beberapa cara dalam melakukan studi lapangan yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan panca indera di SMPN 29 Kota Bandung. Peneliti dalam hal ini tidak ikut serta dalam kegiatan rutin di SMPN 29 Kota Bandung, peneliti hanya sebatas melihat dan mengamati kegiatan yang berlangsung di SMPN 29 Kota Bandung.
2. Wawancara, yaitu mencari keterangan serta pendapat dari narasumber sebagai bahan informasi peneliti yang dapat dijadikan data-data dalam menyusun Skripsi. Tahapan yang peneliti lakukan yaitu pada observasi awal ada proses wawancara yang tidak terstruktur *(nonstructured interview)* yaitu pertanyaan yang akan diajukan tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Peneliti bebas untuk mengajukan pertanyaan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi berupa data-data atau dokumen yang bersifat tertulis, *audio* (suara), video, hasil pembicaraan yang berlangsung melalui *email*, gambar-gambar yang berhubungan dengan objek penelitian dan data dalam bentuk foto-foto yang berkaitan dengan proses penyaluran dana BOS.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik *Purposive.*Teknik *purposive* ini merupakan teknik penentuan informan yang membutuhkan ketepatan dalam memperhatikan kriteria-kriteria tertentu pada suatu populasi dengan memperhatikan objek penelitian yang peneliti ambil.

Tempat penelitian yaitu di SMPN 29 Kota Bandung dimana kepala Tata Usaha dan pengurus dana BOS Kota Bandung merupakan objek peneliti (informan) yang dianggap mengetahui mengenai proses penyaluran dan pengunaan uang dana BOS Kota Bandung yang berlangsung mulai tahun 2009.

Adapun yang menjadi informan Kepala Sekolah SMPN 29 Kota Bandung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala sekolah yaitu pemimpin SMPN 29 Kota Bandung sebagai penanggung jawab dana BOS dan berperan dalam penyetujuan rancangan program BOS serta berperan dalam pembuatan RAPBS.
2. Komite Sekolah yaitu melakukan fungsi *check and balance* bersama dengan kepala sekolah untuk mengikuti proses penyaluran dana BOS. Organisasi di sekolahyang bersifat independen berfungsi menampung aspirasi masyarakat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di SMPN 29 Kota Bandung. Komite sekolahberfungsi sebagai pengawas jalannya program BOS.
3. Kepala Tata Usaha SMPN 29 Kota Bandung yang berperan sebagai perwakilan sekolah dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi di SMPN 29 Kota Bandung yang mengetahui informasi mengenai penggunaan dana BOS di SMPN 29 Kota Bandung.

4. Siswa SMPN 29 Kota Bandung yang dianggap sebagai objek penerima dana BOS sehingga dianggap mengetahui mengenai alokasi dan distribusi dana BOS di SMPN 29 Kota Bandung.
5. Orang tua siswa yang dipilih yaitu memiliki dua kategori, orang tua siswa yang mampu dan yang miskin. Kedua kategori tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda mengenai dampak adanya program BOS. Orang tua siswa yang mampu merasa program BOS ini "baik" dan "cukup membantu" sedangkan orang tua yang miskin merasa "masih kurang membantu" karena masih keberatan dengan biaya-biaya operasional lainnya.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual dan membuang informasi atau data data-data yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan judul penelitian. Data-data tersebut dianalisa lebih mendalam lagi.

2. *Data Display* (penyajian data), yaitu peneliti menyaring data-data yang dianggap penting untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan sehingga penyajian data pun dapat akurat.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu lebih kepada proses *re-checking* atas kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan yang dibahas pada skripsi ini berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan.Disamping itu data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Geger Arum No.11A Telp: (022) 212579, *website:*www.smpn29bandung.sch.idAdapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2012	Tahun 2013							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1.	**Tahap Persiapan**									
	Pemilihan Lokasi dan Pengajuan Judul									
	Studi Kepustakaan									
	Seminar UP									
2.	**Tahap Pelaksana**									
	a. Penelitian Awal									
	Observasi									
	Wawancara									
3	**Tahap Akhir**									
	Penyusunan Skipsi									
	b. Sidang Skipsi									

Tabel penelitian tersebut merupakan gambaran prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam upaya menyelesaikan laporan skripsi dimana ada tiga tahapan inti yang harus dilaksanakan dalam proses penyelesaian pembuatan laporan skripsi, yaitu: ***Pertama,*** tahap persiapan dimana peneliti pada tahap ini melalui proses pemilihan lokasi dan pengajuan judul kepada sekretariat jurusan kemudian peneliti melakukan studi kepustakaan. ***Kedua,*** tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah seperti penelitian awal, observasi, wawancara, serta seminar usulan penelitian (UP).***Ketiga,*** yaitu tahap yang merupakan puncak dari proses penyelesaian skripsi yaitu penyusunan skripsi dan sidang skripsi.